

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan dana bansos pada Dinas Sosial Kota Padang serta sistem pengendalian intern pada pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Bantuan sosial adalah pembelian uang atau barang kepada individu atau kelompok masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dengan tujuan mengurangi resiko sosial.
2. Pada Dinas Sosial Kota Padang bantuan bersumber dari APBN dan APBD, namun penyaluran bantuan kepada korban dalam bentuk barang dan sembako.
3. Pencairan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD ini dicairkan melalui BPKA dengan mengajukan proposal untuk melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga dengan megacu pada DPA Dinas Sosial.
4. Unsur-unsur yang terkandung dalam Sistem Pengendalian Intern (SPIP) menjadi tolak ukur dalam menilai keefektivitasan prosedur pencairan dana bansos pada Dinas Sosial Kota Padang. Unsur-unsur tersebut yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan saling berkalitan satu dengan yang lainnya, menyatu pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan

berulang-ulang oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Prosedur pencairan dana bansos ini telah memenuhi kaidah SPIP dengan berpedoman pada Perwali Kota Padang Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPIP dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya Dinas Sosial khususnya bidang Linjamsos dikatakan cukup baik dalam menjalankan tugas. Diharapkan Dinas Sosial konsisten dalam meningkatkan kinerjanya dan tetap berpedoman pada perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan. Terkait pemahaman IT, diharapkan pegawai melakukan perkembangan dalam memahami IT.

